

# **Analisis Komunikasi pada Program Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Banyumas**

## ***Communication Analysis on the Stunting Prevention Acceleration Program in Banyumas District***

**Dyah Retna Puspita<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB *University*

\*dyahretna@apps.ipb.ac.id

### **ABSTRAK**

Target pemerintah untuk mempercepat penurunan kasus stunting di Indonesia hingga 14 persen pada 2024 membutuhkan dukungan semua pihak. Melalui penelitian di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas ini, kami mengidentifikasi empat strategi: (1) Strategi Berbasis Media yang Digunakan (Media Based Strategy), (2) Strategi Desain Instruksional, (3) Strategi Partisipatif dan (4) Strategi Pemasaran. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan komunikasi telah mencakup hampir semua komponen baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah dari tingkat kecamatan hingga desa. Namun, pendekatan target masih terbatas pada perempuan/istri. Bahkan, beberapa penelitian membuktikan bahwa pendekatan kepada suami juga diperlukan, karena mereka adalah kepala keluarga yang dalam hal-hal tertentu (termasuk KB, kesehatan reproduksi dan pangan) masih mendominasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Untuk itu, disarankan untuk melengkapi pendekatan komunikasi kepada suami.

***Kata kunci: Kabupaten Banyumas, komunikasi pembangunan berkelanjutan, stunting, penyuluhan***

### **ABSTRACT**

*The government's target to accelerate the reduction of stunting cases in Indonesia to 14 percent by 2024 requires the support of all parties. Through this research on DPPKBP3A Banyumas Regency, we identify four strategies: (1) Strategy Based on Media Used (Media Based Strategy), (2) Instructional Design Strategy, (3) Participatory Strategy and (4) Marketing Strategy . From this study, it can be concluded that the communication approach has covered almost all components from both government and non-government institutions from the district to village levels. However, the target approach is still limited to women/wives. In fact, several studies have proven that an approach to husbands is also needed, because they are the head of the family which in certain matters (including family planning, reproductive health and food) still dominates in family decision-making. For this reason, it is recommended to complete the communication approach to husbands.*

***Keywords: Banyumas Regency, sustainable development communication, stunting, counseling***

## A. Latar Belakang

Mulai tahun 2016, terdapat sebuah rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan serta melindungi lingkungan yang dinamakan *Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB). Rencana aksi yang berlaku hingga tahun 2030 ini berlaku universal, sehingga semua Negara tanpa kecuali memiliki kewajiban moral untuk mencapainya. Salah satu targetnya adalah penangani Stunting yang termasuk Tujuan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Agar target ini tercapai, diperlukan model pembangunan yang partisipatif yang melibatkan semua komponen bangsa.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita, dimana angka tersebut masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20 persen. Sehubungan dengan hal ini, Presiden mencanangkan kebijakan Percepatan Penanganan Stunting sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan kebijakan Pemerintah yang menargetkan bahwa pada tahun 2024 prevalensi *stunting* di Indonesia akan turun menjadi 14 persen. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Tujuannya adalah meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan *stunting*, juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor (Bappenas 2021).

BKKBN merupakan lembaga yang diberi amanah Presiden untuk menjadi koordinator atau Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia. Tugas ini selanjutnya didelegasikan ke semua Provinsi yang kemudian diturunkan ke tingkat kabupaten/kota. Di tingkat Kabupaten/Kota, amanah tersebut dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh sebuah tim yang disebut dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting.(TPPS) yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah. Salah satunya adalah Dinas Keluarga Berencana (Dinas KB) atau nomenklatur lain yang sejenis. Jadi TPPS adalah lembaga yang dibentuk lintas sektor untuk melakukan koordinasi, sinergi dan integrasi program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Jawa Tengah termasuk satu provinsi yang masuk 12 besar dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia karena terdapat 19 kabupaten/kota yang masuk kategori kuning atau memasuki prevalensi 20-30 persen. Menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada 2021 sebanyak 20,9% anak berusia di bawah lima tahun (balita) di Jawa Tengah mengalami *stunting*. Artinya, *stunting* atau gangguan pertumbuhan ini kira-kira dialami oleh 1 dari 5 balita di Jawa Tengah (Kusnandar, 25 Juli 2022).

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk 100 kabupaten/kota prioritas penanganan stunting se-Indonesia (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017) adalah Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2021 kasusnya mencapai 21,6 persen (DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, 2022). Adapun pada tahun 2022, menurut Bupati Banyumas kasusnya mencapai angka 5.000 kasus. Dari jumlah ini, 2.000 kasus terjadi pada usia balita dan 3.000 kasus terjadi pada anak-anak lebih dari lima tahun ([Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/3-September-2022). 3 September 2022). Untuk itu, ditargetkan angkanya terus menurun menjadi 18,83 pada tahun 2022 dan 15,67 persen pada tahun 2023, sehingga pada tahun 2024 angkanya tinggal 12,93 persen. Dengan kata lain, pada tahun 2024, target kasusnya lebih rendah

dibandingkan nasional (DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, 2022). Adapun untuk keluarga beresiko stunting (keluarga yang memiliki resiko untuk melahirkan anak stunting), berdasarkan Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) jumlahnya mencapai 44,11 persen (242.305KK) dari total 549.310 KK. Artinya, hanya 55,89 persen (307.005 KK) yang tidak beresiko stunting.

Untuk mengejar target tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menentukan sasaran programnya adalah keluarga yang memiliki bayi beumur 0-2 tahun (baduta), keluarga yang memiliki bayi berumur -05 tahun (balita), Pasangan Usia Subur (PUS), Calon Pengantin (Catin) serta PUS hamil. Bentuk pendampingannya adalah berupa: kunjungan/penyuluhan/KIE, fasilitasi pelayanan rujukan serta fasilitasi bantuan sosial. Mereka akan didampingi oleh tim yang disebut dengan Tim Pendamping Keluarga/TPK yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK dan kader KB (Tim Pencegahan Stunting DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji strategi komunikasi berkelanjutan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBP3A) sebagai *leading sector* program Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Banyumas. Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan (Nurdin, 2013). Adapun menurut Qubral (dalam Astuti, 2017), komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Komunikasi pembangunan dapat dicerminkan oleh suatu komunikasi yang berorientasi pada: 1) Perilaku/edukasi, 2) Kesejahteraan dan 3) Menuju ke arah kemajuan masyarakat (Wibowo et al., 2011).

Untuk menggerakkan masyarakat agar ikut terlibat aktif dalam pembangunan, dibutuhkan strategi komunikasi yang baik oleh seorang pemimpin (Surahmi & Farid, 2018). Strategi komunikasi pembangunan dapat dimaknai sebagai perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi dalam penyebaran pesan-pesan pembangunan guna mengajak masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Arti penting strategi komunikasi dalam kaitannya dengan pembangunan di suatu negara ini dimaknai oleh Effendy (2010), mempunyai fungsi: (1) menjembatani “cultural gap” akibat kemudahan yang diperoleh dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu kuat pengaruhnya, dan jika dibiarkan akan merusak tataran budaya bangsa sendiri serta (2) mensosialisasikan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran guna memperoleh hasil yang optimal (Fajri et al., 2018).

Terdapat empat strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Academy for Educational Development (AED) yaitu: **pertama**, Strategi yang Didasarkan pada Media yang Dipakai (*Media Based Strategy*). Media komunikasi yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan tujuan komunikasi dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima (Tahoba, 2011). Media yang dipakai bisa menggunakan media cetak, media elektronik, media sosial maupun komunikasi antarpribadi. Untuk masyarakat luas, pesan sebaiknya disalurkan melalui media massa, misalnya surat kabar atau televisi, dan untuk kelompok tertentu digunakan saluran komunikasi kelompok (Wijaya, 2015). Strategi ini memang merupakan teknik yang paling mudah, paling populer, dan tentunya yang paling kurang efektif (Astuti, 2017)

**Kedua**, Strategi Desain Instruksional. Strategi ini dipakai oleh para pendidik yang fokus pada pembelajaran individual sebagai sasaran utama. Strategi kelompok ini, mendasarkan diri dari teori-teori belajar formal, dan berfokus pada pendekatan sistem untuk pembangunan materi pembelajaran seperti evaluasi formatif, uji coba, dan desain program berjenjang (Astuti, 2017). Secara umum strategi ini memiliki tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi dan tahap evaluasi. **Ketiga**, Strategi

Partisipatori. Dalam strategi partisipatori ini, prinsip-prinsip penting dalam mengorganisir kegiatan adalah kerja sama komunitas dan pertumbuhan pribadi (Astuti, 2017). Strategi ini melakukan pendekatan melalui pendidikan nonformal seperti pelatihan. **Keempat**, Strategi Pemasaran. Strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa dalam prinsip social marketing yakni teknik pemasaran yang tidak hanya mencari keuntungan yang diperoleh dari sebuah penjualan, melainkan memfokuskan pada apa yang konsumen butuhkan dan inginkan dari suatu yang diproduksi oleh produsen (Astuti, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah kabupaten Banyumas, khususnya DPPKBP3A dalam upaya mempercepat penurunan kasus stunting di Kabupaten Banyumas dilihat dari aspek: (1) Strategi yang Didasarkan pada Media yang Dipakai (*Media Based Strategy*), (2) Strategi Desain Instruksional, (3) Strategi Partisipatory dan (4) Strategi Pemasaran.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Pemilihan pendekatan ini adalah agar dapat mendeskripsikannya secara sistematis, fakta atau sifat populasi tersebut secara sistematis, faktual, dan akurat, sekaligus mencoba menggambarkan suatu fenomena secara detail (Yusuf, 2014:62). Data berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primernya adalah Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kepala Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB (Sub Koordinator PPKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas. Adapun data sekundernya diambil dari laporan kegiatan dan materi presentasi dari pejabat di lembaga tersebut serta dari cuplikan berita yang ada di media massa. Teknis analisis datanya menggunakan model Huberman dan Miles (dalam Saldana, 2014) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas dan juga sebagai suatu yang terjalin pada saat sebelum, selama, dan setelah melakukan pengumpulan data.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **(1) Strategi yang Didasarkan pada Media yang Dipakai (*Media Based Strategy*)**

Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, upaya yang dilakukan terlebih dahulu adalah membuat landasan formal kinerjanya yakni dengan membuat Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 050/184/Tahun 2022 tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Surat Keputusan (SK) Bupati ini merupakan tindak lanjut/penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam SK ini disebutkan bahwa Tim Pengarah dipimpin oleh Bupati dengan anggota tujuh Kepala Lembaga di Kabupaten Banyumas yakni: Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resort Komandan Distrik Mliler 0711 Banyumas, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Ketua Pengadilan Negeri Banyumas serta Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas. Tugas Tim ini antara lain: memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten.

Pada SK yang sama dibuat pula Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terdiri dari 43 personil yang mewakili sejumlah Dinas (dari Kepala Dinas hingga Kepala Seksi) serta lembaga-lembaga non-Pemerintah yang terkait. Tugas Tim ini lebih teknis, di antaranya adalah mengoordinasi, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan stunting antar perangkat daerah

dan pemerintah desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten. Dari sini tampak bahwa Tim inilah yang akan mengoordinir semua komponen yang terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas dari tingkat kabupaten hingga desa, baik dari kalangan lembaga Pemerintahan maupun non-Pemerintahan.

Perlunya pelibatan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan stunting tampak dari penekanan Bupati Banyumas yang menyatakan bahwa penurunan angka prevalensi stunting harus menjadi target kinerja seluruh jajarannya.

“Saya minta seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan stakeholder terkait untuk bisa merumuskan target tersebut. Sehingga, kalau saat ini masih 21,6 persen, artinya setiap tahunnya harus berhasil minimal 2,5 persen, untuk menuju tahun 2024 (sebesar) 14 persen, (Jatengprov.go.id, 25 Mei 2022).

Untuk memudahkan koordinasi, dibentuk Forum Jaga stunting Banyumas (Jatingmas) dan Buku Saku Jatingmas. Forum ini terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinsospermades, Bappedalitbang, DPPKBP3A, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Permukiman. Forum ini merupakan media untuk menguatkan tugas para Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berkecimpung di bidang penanggulangan stunting atau tengkes (Antara Kantor Berita Indonesia, 14 Juni 2021)

Di tingkat Kecamatan, komunikasi dan koordinasinya dilakukan melalui media rapat yang dinamakan Mini Lokakarya. Pesertanya adalah dari pihak Puskesmas, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan (Korwil Dindik), Lurah/Kepala Desa, Koordinator Penyuluh KB serta Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Kasi Permas).

Karena kebanyakan kasus stunting terjadi di perdesaan, maka di tingkat desa/kelurahan dibentuklah Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB. Tugasnya adalah melakukan pendampingan yang meliputi kegiatan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/ calon PUS, ibu hamil, ibu pasca persalinan serta anak usia 0-59 bulan. Selain itu, melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting.

## **(2) Strategi Desain Instruksional**

Strategi desain instruksional adalah strategi yang memberikan pelatihan atau kegiatan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu yang diperuntukkan pada masyarakat. Dalam kaitannya dengan penanganan stunting di Kabupaten Banyumas, strategi ini ditempuh dengan memberikan pelatihan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak program ini. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 18-23 Agustus 2022. Mereka diberikan informasi tentang pengertian stunting, fenomena stunting di Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21), penggunaan aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) dan sebagainya. Pelatihan dilakukan di tingkat kecamatan, sehingga hampir setiap hari pengelola dari DPPKBP3A harus selalu berkeliling dari kecamatan ke kecamatan. Sebagai contoh, pada tanggal 23 Agustus 2022. Pelatihan diadakan di Kecamatan Purwokerto Utara diikuti oleh 96 peserta yang terbagi dalam dua termin. Di kecamatan ini terdapat 32 TPK yang terbagi di tujuh kelurahan (Suara Banyumas, 24 Agustus 2022).

Salah satu tugas TPK adalah pendampingan terhadap Calon pengantin/catin melalui aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil). Selanjutnya, pada bulan Juni 2022 dilakukan evaluasi terhadap implementasi aplikasi tersebut. Dari kegiatan ini tampak bahwa masih terdapat 79 persen calon pengantin (Catin) yang sebetulnya berisiko (antara lain karena umurnya yang terlalu muda dan calon laki-laki yang perokok), tetapi belum mendapat pendampingan dari TPK. Ibu A (Kepala Sub-koordinator PPKB mengatakan:

Iya, masih banyak catin beresiko yang belum mendapat pendamping TPK. Yang sudah banyak pendamping baru ada di Kecamatan Gulemar dan Rawalo. Sedang ditelusuri penyebabnya.

(wawancara tanggal 22 Agustus 2022).

### **(3) Strategi Pemasaran**

Strategi pemasaran adalah strategi yang dipakai untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam hal program percepatan penurunan stunting, konsumennya adalah para calon pengantin, keluarga yang memiliki ibu hamil, keluarga yang memiliki anak usia di bawah dua tahun (baduta) serta keluarga yang memiliki anak di bawah lima tahun (balita).

Upaya memasarkan ‘ide pencegahan stunting’ di kalangan para Catin adalah melalui aplikasi Elsimil yang telah dibuat oleh BKKBN. Di sini, pasangan yang akan menikah diminta mengunduh aplikasi tersebut dari Playstore dan kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan baik untuk pihak catin perempuan maupun catin laki-laki. Catin perempuan diminta mengisi data diri seperti umur, Berat Badan (BB), tekanan darah dan lingkaran kepala. Adapun untuk catin laki-laki diminta memberikan informasi seputra umur dan kebiasaan perokok. Setelah mengisi kuesioner tersebut, mereka akan mendapatkan sertifikat yang berisi informasi apakah mereka adalah pasangan yang “aman” ataukah “beresiko”. Status “beresiko” ini dapat diperoleh karena karena umur yang terlalu muda, catin laki-laki merokok atau penyebab lain). Setelah itu, TPK akan siap mendampingi mereka dengan memberikan informasi seputar kesehatan reproduksi, perencanaan kelahiran anak dan sebagainya.

Adapun bentuk pemasaran yang berupa intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil adalah berupa pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil serta melindungi ibu hamil dari Malaria. II. Pada sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan, intervensinya berupa kegiatan yang mendorong inisiasi menyusui dini/IMD terutama melalui pemberian ASI jolong/colostrum serta mendorong pemberian ASI Eksklusif. III. Adapun intervensi dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan adalah berupa kegiatan untuk mendorong penerusan pemberian ASI hingga anak/bayi berusia 23 bulan. Kemudian, setelah bayi berusia diatas 6 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI, menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zink, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Intervensi Gizi Spesifik ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas di wilayah masing-masing.

### **(4) Strategi Partisipatory**

Strategi partisipatori adalah strategi komunikasi yang memanfaatkan kerjasama komunitas yang memiliki pengalaman sesuai dengan topic pembangunan yang ingin dikomunikasikan dalam jangka waktu tertentu. Strategi ini melakukan pendekatan melalui pendidikan nonformal seperti pelatihan yang memungkinkan komunitas atau lembaga lain untuk saling bertukar informasi.

Strategi ini dipakai oleh Pemkab Banyumas dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat (terutama kaum ibu dari pasangan usia subur) dari bahaya memiliki anak stunting. Salah satu upayanya adalah menggandeng program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh universitas di wilayah Banyumas. Salah satunya adalah KKN dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di Desa Selandaka yang mengadakan program kerja yang diberi nama “Ina Ceting” (Inisiasi Cegah Stunting). Kegiatannya adalah berupa sosialisasi pencegahan peningkatan kasus stunting di Banyumas, antara lain di desa Pandak (Kompasiana, 25 Agustus 2022). Sasarannya adalah ibu-ibu kader posyandu, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuan programnya adalah membantu

mensukseskan program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, dengan memfokuskan pada pemahaman masyarakat terkait pengolahan pangan, gizi, pola asuh, sanitasi, dan juga stunting. Melalui program ini diharapkan masyarakat menjadi sadar dan paham akan pentingnya pencegahan stunting yang dapat dicegah dengan menjaga sanitasi lingkungan, menerapkan pola asuh dan pola makan yang baik dan benar, serta melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang anak (Kompasiana, 2 September 2022).

Dari gambaran di atas tampak bahwa upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas yang dilakukan menggunakan empat jenis strategi masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini tampak dari masih banyaknya Catin Beresiko yang belum mendapat pendampingan dari TPK. Mengingat faktor resikonya para catin tersebut antara lain disebabkan karena pola perilaku merokok dari catin laki-laki, maka apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan dapat mengurangi kualitas anak yang akan dilahirkan.

Kelemahan lain yang tampak dari strategi komunikasi yang digunakan Pemkab Banyumas dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah kurangnya pendekatan dan kampanye kepada kalangan laki-laki/suami. Penyuluhan-penyuluhan yang diberikan lebih banyak menyertakan kalangan perempuan/istri saja. Padahal, dukungan suami juga sangat dibutuhkan, karena pada umumnya yang menjadi kepala keluarga adalah laki-laki/suami, sehingga banyak keputusan penting dalam keluarga (termasuk dalam kaitannya dengan pola makan, kesehatan reproduksi istri dan sebagainya) sangat membutuhkan dukungan suami. Kajian Nurianti, dkk. (2021) misalnya, menyebutkan adanya hubungan antara dukungan suami dengan ibu hamil dalam proses persalinan istri. Wulandari dan Kusumastuti (2020) menemukan adanya hubungan antara dukungan keluarga (termasuk suami) dengan pencegahan stunting. Hayat, dkk., (2021) menyimpulkan adanya peran dukungan suami terhadap pemanfaatan pelayanan gizi oleh ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK). Adapun Riasmoko, dkk., (2011) serta Nilawati dan Hirawati (2011) menemukan adanya dukungan suami dalam program KB.

#### **D. KESIMPULAN**

Target Pemerintah mempercepat penurunan kasus stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada tahun 2024 perlu mendapat dukungan semua pihak. Melalui penelitian pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas ini dapat diidentifikasi empat strategi yang dilakukan yakni melalui: (1) Strategi yang Didasarkan pada Media yang Dipakai (*Media Based Strategy*), (2) Strategi Desain Instruksional, (3) Strategi Partisipatory dan (4) Strategi Pemasanan. Dari telaah ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan komunikasinya sudah mencakup hampir semua komponen baik dari kalangan lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa. Akan tetapi, sasaran pendekatannya masih terbatas hanya di kalangan perempuan/istri. Padahal, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pendekatan terhadap kalangan suami juga sangat dibutuhkan, karena mereka adalah kepala keluarga yang dalam hal-hal tertentu (termasuk dalam masalah KB, kesehatan reproduksi dan pangan) masih mendominasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Untuk itulah disarankan untuk melengkapi pendekatan komunikasinya kepada kalangan suami.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Antara Kantor Berita Indonesia. 14 Juni 2021. Pemkab Banyumas luncurkan Jatingmas untuk atasi stunting. <https://www.antarane.ws.com/berita/2210414/pemkab-banyumas-luncurkan-jatingmas-untuk-atasi-stunting>

- Buluamang, Y. M., & Handika, L. P. (2018). Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Pengembangan Pariwisata Development Communication Strategy In Developing The Tourism. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(2), 89-101.
- DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. 2022. Power point Optimalisasi Peran TPK (Verval Data Sasaran Stunting PK21 sebagai Upaya Cegah Stunting.
- DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. 2022. Power point Evaluasi Elsimil Bulan Juni 2022 Kabupaten Banyumas.
- Hayat, F., Arifiati, N., & Permatasari, T. A. E. (2021). Peran Dukungan Suami dan Faktor Lainnya terhadap Pemanfaatan Pelayanan Gizi oleh Ibu Hamil dengan Risiko Kurang Energi Kronis (KEK). *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 125-133.
- Jatengprov.go.id. 25 Mei 2022. Turunkan Prevalensi Stunting pada 2024, Ini Langkah Banyumas dan Wonosobo. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/turunkan-prevalensi-stunting-pada-2024-ini-langkah-banyumas-dan-wonosobo/>
- Nilawati, S., & Hirawati, H. (2014). Hubungan dukungan suami dengan kepatuhan akseptor KB suntik progestin melakukan suntik ulang di BPM ny. supiyah, Amd. keb Desa Muntung Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. *Jurnal Keperawatan Maternitas*, 2(2), 98-105.
- Kompasiana. 25 Agustus 2022. Mahasiswa KKN UMP Desa Pandak Mengadakan Sosialisasi Inisiasi Cegah Stunting: "INA CETING". <https://www.kompasiana.com/kkndesapandak2349/63072bb2c8351252ed473155/mahasiswa-kkn-ump-desa-pandak-mengadakan-sosialisasi-inisiasi-cegah-stunting-ina-ceting-berkolaborasi-dengan-puskesmas-i-sumpiuh>
- Kompasiana.com. 3 September 2022. Cegah Stunting Itu Penting (CETING)" Bersama Masyarakat Desa Selandaka Kabupaten Banyumas. <https://www.kompasiana.com/ridharrachman5425/6312d64ec3bdf6ee5264d02/cegah-stunting-itu-penting-ceting-bersama-masyarakat-desa-selandaka-kabupaten-banyumas>
- Ramadhani, R. W. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117-129.
- RIASMOKO, A., Yuli Kusumawati, S. K. M., Suswardany, D. L., & SKM, M. (2011). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Dukungan Suami Terhadap Kepesertaan Istri Dalam Program Keluarga Berencana Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Suarabanyumas.com. 21 November 2022. Percepatan Penurunan Stunting Dievaluasi. <https://suarabanyumas.com/percepatan-penurunan-stunting-dievaluasi/>
- Suara Banyumas. 24 Agustus 2022. Tim Pendamping Keluarga IKut Orientasi, Ini Tujuannya. Tingkatkan Peran Anggota. <https://suarabanyumas.com/tim-pendamping-keluarga-ikut-orientasi-ini-tujuannya/>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2017. 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk intervensi anak Kerdil (Stunting). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Tim Pencegahan Stunting DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. 2022. Power point Strategi Pencegahan Stunting.
- Wulandari, H. W., & Kusumastuti, I. (2020). Pengaruh Peran Bidan, Peran Kader, Dukungan Keluarga dan Motivasi Ibu terhadap Perilaku Ibu dalam Pencegahan Stunting pada Balitanya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 19(02), 73-80.